

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dinamika hubungan internasional sudah semakin berkembang seiring dengan adanya perkembangan politik dunia. Ancaman yang dihadapi oleh dunia saat ini bukan hanya tentang keamanan tradisional seperti perang, melainkan juga tentang isu-isu yang berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Salah satunya yaitu kelaparan yang sedang melanda di beberapa negara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Actions Against Hunger* bahwa saat ini kelaparan dunia terus meningkat yang kemudian memengaruhi hampir 10% orang secara global. Dari 2019 hingga 2022, jumlah orang yang kekurangan gizi bertambah sebanyak 150 juta, krisis yang sebagian besar didorong oleh konflik, perubahan iklim, dan pandemi Covid 19(Hunger, n.d.).

Terjadinya kelaparan ketika seseorang tidak lagi mendapatkan cukup makan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dampak dari adanya kelaparan banyak di rasakan oleh semua orang terutama anak-anak, ibu hamil dan orang rentan lainnya. Efek penting lainnya dari kelaparan pada anak-anak termasuk *wasting* (berat badan rendah untuk upah), berat lahir rendah, dan dalam kasus ekstrim kematian bayi dan anak. Di negara-negara dengan tingkat kelaparan yang tinggi, kelaparan dapat berdampak pada perekonomian nasional(Worldwide, 2022a).

Tanpa kelaparan merupakan salah satu tujuan dari program *Sustainable Development Goals* (SDG's) no 2 yaitu "*zero hunger*". SDG's merupakan seruan

mendesak untuk semua negara baik itu maju maupun berkembang dalam kemitraan global. Dalam hal ini semua negara harus menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan. Salah satu *goals* nya yaitu “zero hunger” untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan(*THE 17 GOALS | Sustainable Development*, n.d.). Dalam melihat keberhasilan pencapaian “zero hunger” PBB memaparkan 5 target antara lain yaitu :

1. Akses ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun
2. Mengakhiri malnutrisi dalam segala bentuknya
3. Meningkatkan produktivitas pertanian
4. Sistem pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan
5. Diversifikasi tanaman dan benih(Worldwide, 2022b).

Pangan merupakan kebutuhan pokok dasar utama yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu suatu negara tentu harus mampu dalam memastikan serta menjaga kesediaan pangan di negaranya agar terhindar dari ancaman–ancaman kelaparan serta akses pada makanan yang bergizi bagi penduduknya. Menurut FAO (*Food Agriculture Organization*) ketahanan pangan yaitu ketika semua orang yang memiliki kesehatan secara fisik dan ekonomi dalam mendapatkan akses dalam mendapatkan keselamatan dan keamanan yang memadai untuk mendapatkan makanan yang bergizi serta dalam memenuhi preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat(FAO, 2008).

Krisis pangan sendiri merupakan fenomena dimana adanya kelangkaan pangan secara meluas di masyarakat. Krisis pangan dapat memicu terjadinya kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi bagi masyarakat yang terdampak. Krisis pangan dapat terjadi dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor perubahan iklim yang tak menentu juga menjadi salah satu terjadinya permasalahan pangan di suatu negara. Karena dengan adanya cuaca dan musim yang tidak menentu akan berdampak pada alam seperti terjadinya bencana alam seperti banjir kekeringan, ataupun longsor yang berdampak buruk terhadap sektor pertanian atau produksi pangan di suatu negara. Yang akan mempengaruhi kepada kenaikan harga pokok makanan yang naik secara drastis karena adanya kelangkaan pangan di suatu negara (Prof. Drs. Budi Winarno, MA, 2011).

Krisis pangan juga dapat terjadi karena adanya konflik yang sedang terjadi di suatu negara. Menurut data yang diterbitkan dari *World Food Program* (WFP) bahwa pada tahun 2021, konflik menjadi faktor utama pendorong terjadinya kerawanan pangan di seluruh dunia. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 99 juta orang di 23 negara mengalami kerawanan pangan yang sangat ekstrim dikarenakan adanya kerusuhan dan keributan di negara-nya (WFP, n.d.-a).

Lebanon sendiri merupakan negara kecil berpenghasilan menengah di kawasan Timur Tengah. Berada di tengah kawasan yang rawan konflik membuat Lebanon menjadi salah satu negara yang menerima dampak dari adanya konflik tersebut. Seperti konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 yang menghambat kegiatan ekspor dan impor di Lebanon. Bukan hanya itu saja dengan adanya konflik memaksa penduduk Suriah meninggalkan wilayahnya untuk mencari

keamanan. Lebanon merupakan salah satu negara tetangga yang menjadi tempat penampungan masyarakat yang terdampak (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

Menurut data yang diperoleh dari UNHCR pada tahun 2017 Lebanon menerima pengungsi sekitar 998 ribu hingga pada tahun 2022 Lebanon menerima pengungsi sekitar 862 ribu. Dengan begitu Lebanon menjadi salah satu negara yang menampung banyak pengungsi di dunia. Bertambahnya jumlah pengungsi ke Lebanon juga mempengaruhi stabilitas politik dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya tergolong stabil serta mempengaruhi terhadap stabilitas penduduk domestik yang khawatir terhadap keamanan negara Lebanon itu sendiri (UNHCR, n.d.) (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

Pada dasarnya krisis pangan yang terjadi di Lebanon dipengaruhi oleh beberapa faktor masalah yang terjadi dalam rentan waktu yang bersamaan. Lebanon dihadapi tantangan ekonomi yang besar yang berdampak kepada krisis pangan di negara tersebut. Sekitar 60% dari PDB Lebanon berasal dari perdagangan, pariwisata, dan jasa keuangan. Namun konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 secara tidak langsung sangat berdampak ke Lebanon sebagai negara tetangga. Dengan begitu negara lain khawatir menginvestasikan uang mereka begitu dekat dengan zona perang atau rawan konflik, banyak investor asing mentransfer dana mereka dari bank Lebanon ke negara lain. Akibatnya, Lebanon menderita kekurangan uang dolar AS (*The Economy – THE EMBASSY OF LEBANON*, n.d.).

Kemerosotan ekonomi yang terjadi di Lebanon merupakan hasil kebijakan ekonomi yang diambil oleh Lebanon pasca Perang Saudara. Selama bertahun-tahun Lebanon dihadapi oleh perseteruan politik, hutang yang

berlebihan, kemudian adanya perombakan industri dan pertanian dan lebih memprioritaskan pariwisata yang pendapatannya tidak menentu. Lebanon mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat drastis dimana hilangnya pendapatan, inflasi, dan devaluasi mata uang Lebanon yang mendorong lebih dari separuh negara di bawah garis kemiskinan(Kharroubi et al., 2021).

Lebanon juga di dihadapi dengan meroketnya suku bunga yang diusulkan oleh bank untuk menarik modal serta stabilitas ilusi nilai tukar Pound Lebanon terhadap Amerika Serikat dollar. Dengan adanya kebijakan fiskal yang tidak efektif itu membuat ekonomi Lebanon tidak mampu menghasilkan hasil dan semakin lemah dan rentan dan juga adanya korupsi oleh para elit politik serta adanya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan permasalahan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya tingkat pengangguran di Lebanon yang mencapai 30 persen pada 2019. Utang publik mendekati 180 persen dari PDB, infrastruktur yang gagal serta tidak adanya keadilan sosial. Hingga pada Oktober 2019 terjadi protes nasional yang menuntut adanya reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Dan mata uang lokal Lebanon juga telah kehilangan 90 persen nilainya. Dimana banyak orang yang tidak memiliki akses terhadap uang mereka sendiri. Yang berdampak kepada naiknya angka kemiskinan, pengangguran, kekurangan obat-obatan serta ketahanan pangan di negara tersebut. Banyak warga yang mengalami kelaparan yang tidak bisa mendapatkan makanan dengan layak dan kekurangan gizi(Fakih, 2022).

Dengan adanya krisis ekonomi ini tentu berdampak kepada gagalnya pemerintah atau ketidakmampuan pemerintah dalam membayar impor penting karena adanya kekurangan uang tunai dari luar negeri sehingga membatasi

kemampuan negara untuk membayar impor, termasuk barang-barang vital seperti gandum dan minyak. Bisnis lokal juga kesulitan karena bank tidak dapat lagi memberi mereka pinjaman jangka pendek. Akibat krisis tersebut, 785 restoran dan kafe ditutup yang menyebabkan hilangnya 25.000 pekerjaan(World, 2020).

Krisis pangan yang terjadi di Lebanon semakin memburuk ketika adanya wabah Covid 19 yang pertama kali masuk ke Lebanon pada tanggal 22 Februari 2020. Pandemi Covid 19 mengganggu rantai pasokan pangan serta hasil panen yang buruk bagi beberapa negara yang berdampak kepada naiknya harga pasar pangan secara global. Diberlakukannya *lockdown* di beberapa kota dengan meminimalisir gerakan manusia, seperti penutupan sekolah membuat sekitar 30 juta anak kehilangan makanan gratis untuk makan siang. Serta kualitas makanan memburuk karena pendapatan keuangan keluarga yang lebih rendah, dengan penurunan konsumsi buah-buahan, biji-bijian, makanan laut dan sayuran(Reine Gedeon, Souheil Hallit, 2022).

Covid 19 semakin memperburuk kondisi ekonomi yang ada di Lebanon Dengan adanya keruntuhan ekonomi dan pandemi Covid 19 telah menghancurkan salah satu sektor terbesar ekonomi Lebanon yaitu pariwisata. Dampak Covid19 meningkatkan tingkat pengangguran Lebanon dari 6,04% pada 2019 menjadi 6,6% pada 2020. Kegagalan sistem ekonomi dan keuangan Lebanon mendorong masyarakat pada jurang kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Lebanon membuat sebagian orang tidak mampu membeli makanan pokok mereka karena adanya kenaikan harga berkali lipat(Corriero et al., 2022).

Meningkatnya kasus Covid 19 ini menjadi ancaman bagi semua negara terkhusus untuk Lebanon karena berdampak negatif terhadap kesediaan makanan,

kelaparan, serta kehabisan makanan. Dengan adanya kecemasan terhadap kesediaan pangan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kebiasaan makan. Terdapat temuan yang menunjukkan bahwa di setiap 16 rumah tangga, 9 makan kurang dari dua kali sehari dan lebih dari 70% untuk bisa menyimpan makanan lebih banyak. Meningkatnya Covid 19 semakin memperburuk situasi dengan adanya kepanikan dalam berbelanja, kenaikan harga makanan, pengurangan pengiriman makanan, dan kesediaan makanan penting (Corriero et al., 2022).

Covid 19 belum mereda namun Lebanon dihadapi masalah kembali yaitu pada Agustus 2020 terjadi ledakan di pelabuhan Beirut yang mengakibatkan kerusakan parah sebagian besar ibu kota. Dampak dari ledakan ini membuat Lebanon semakin tidak aman, serta mempengaruhi kesejahteraan banyak masyarakat lokal Lebanon dan para pengungsi. Akibat dari ledakan ini baik dewasa maupun anak-anak mengalami traumatik secara psikologi karena memicu kekhawatiran dan ketakutan berlebihan. Kemudian akibat efek kolosal dari ledakan pelabuhan Beirut ini menghancurkan gudang biji-bijian dan juga berdampak kepada gangguan kegiatan pada kapasitas impor dan ekspor negara (*Beirut Explosion / NetHope*, n.d.).

Krisis pangan semakin parah ketika adanya perang antara Ukraina dan Rusia. Perang tersebut berdampak kepada pangan secara global khususnya Lebanon. Dengan adanya konflik antara Ukraina dan Rusia ini secara langsung berdampak kepada terhambatnya kapasitas ekspor Ukraina serta akses terhadap pupuk yang dibatasi yang mengganggu pada sektor pertanian serta panen yang tidak pasti di masa depan. Terhambatnya kapasitas ekspor Ukraina berdampak parah bagi negara-negara yang bergantung pada impor pangan dari Ukraina. Salah

satunya yaitu Lebanon yang merupakan negara dependen dalam sektor pemenuhan pangan. Lebanon merupakan negara yang lemah dalam sektor pertanian yang mana Lebanon bergantung 66% pada gandum yang diimpor dari Ukraina dan 12% pada gandum dari Rusia untuk roti dan produk roti lainnya. Sedangkan produksi lokal hanya dapat memenuhi 20 % permintaan domestik (Ben Hassen & El Bilali, 2022).

Adanya permasalahan ekonomi, politik, keamanan, dan kesehatan yang terjadi bersamaan di Lebanon tentu sangat berdampak nyata terhadap keselamatan, mata pencaharian, dan martabat orang-orang, terutama bagi keluarga Lebanon dan pengungsi yang paling rentan, serta membahayakan stabilitas negara. Khususnya keadaan krisis pangan yang terjadi di Lebanon berdampak secara langsung terhadap sebagian populasi yang tergolong paling rentan dan lemah secara ekonomi hanya mampu membeli makanan dengan cara meminjam uang secara terus menerus yang akan berpengaruh terhadap menumpuknya utang bahkan beberapa terpaksa mengurangi kuantitas makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Peningkatan harga pokok makanan yang terjadi di Lebanon seperti minyak, gula, dan roti telah meningkat sekitar 20 persen di tahun 2022. Krisis Pangan yang terjadi di Lebanon menunjukkan bahwa 50 % penduduk tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan gizi dasarnya (Davare, 2022).

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam waktu bersamaan membuat naiknya angka rawan pangan di Lebanon pada tahun 2021-2022. Sekitar 3,4 juta orang di Lebanon membutuhkan bantuan manusia. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Human Right Watch* bahwa hak asasi manusia di Lebanon semakin memburuk pada tahun 2021. Lebih dari 80 persen penduduk di Lebanon

tidak memiliki akses ke hak-hak dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, seperti perumahan dan listrik yang layak (*World Report 2022: Lebanon* / *Human Rights Watch*, n.d.).

Krisis pangan yang melanda Lebanon tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak akan tetapi semua pihak baik itu negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan swasta perlu menolong Lebanon. Salah satu organisasi internasional yang paling besar memberikan kontribusinya untuk Lebanon yaitu seperti *World Food Programme* (WFP) yang memberikan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Lebanon dan juga para pengungsi Suriah di Lebanon yang rentan memiliki makanan bergizi. WFP sudah memberikan bantuan penyelamatan nyawa kepada pengungsi di Lebanon sejak 2012. Sejak saat itu WFP juga memberikan bantuan teknis dan dukungan penguatan kapasitas kepada Pemerintah Lebanon (Programme, n.d.-a).

WFP juga merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang memberikan bantuan dalam menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat melalui bantuan pangan agar terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, bagi orang-orang yang pulih dari konflik, bencana, dan dampak perubahan iklim. WFP telah ada sejak tahun 1961 yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bergerak dibawah naungan *Food Agricultural Organization* (*Who We Are / World Food Programme*, n.d.).

World Food Programme menjadi salah satu yang memegang peran penting dalam mencapai poin 2 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu “*Zero Hunger*. yang berupaya mengakhiri kelaparan, mencapai pangan keamanan dan gizi yang lebih baik, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. WFP

menjadi salah satu organisasi internasional yang hanya menjadi wadah karena sepenuhnya bergantung kepada adanya kontribusi secara sukarela untuk pendanaannya. (*WFP and the Sustainable Development Goals (SDGs) / World Food Programme*, n.d.). WFP menjadi salah satu Organisasi Internasional yang menjadi garda terdepan dalam membantu Lebanon dalam mengurangi krisis pangan di negaranya. Dalam membantu dalam menangani krisis pangan di Lebanon, WFP memiliki beberapa operasional kerja salah satunya bersama pemerintah WFP merancang *Lebanon Country Strategic Plan* pada tahun 2018–2022. WFP membantu berbagai permasalahan yang terjadi di Lebanon salah satunya pada tahun 2022 WFP memberi bantuan terhadap 1,8 juta orang melalui modalitas transfer berbasis tunai sebesar USD 22 juta dan melalui distribusi paket makanan. WFP memberikan bantuan untuk masyarakat lokal Lebanon sebanyak 683.400 orang Lebanon, kemudian pengungsi suriah 1.087.000 dan 5.300 pengungsi dari negara lain (World Food Program, 2018).

Didalam *Lebanon Country Strategic Plan 2018-2022* ini WFP membuat beberapa program seperti membantu dalam krisis ekonomi kepada masyarakat yang rentan, kemudian memberikan bantuan pangan dan bantuan dasar pengungsi suriah Lebanon, *school meal* dalam pemenuhan gizi serta membantu dalam mengakses pendidikan yang lebih baik kemudian FFA dan FFT dalam memberikan berbagai cara dalam membantu masyarakat dalam merencanakan dalam pengelolaan mata pencarian yang baik serta memberikan bantuan sosial dalam membantu masyarakat dalam memerangi kemiskinan yang ekstrim. Hingga tanggapan terhadap ledakan di pelabuhan Beirut (Programme, n.d.-a).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kontribusi yang diberikan oleh WFP sebagai salah satu organisasi internasional dalam membantu krisis pangan yang terjadi di Lebanon pada tahun 2018-2022 dengan judul penelitian **“Kontribusi *World Food Programme* (WFP) Dalam Menangani Krisis Pangan Di Lebanon”**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana implementasi program WFP dalam menangani krisis pangan di Lebanon melalui program kerangka kerja *Lebanon Country Strategic Plan* pada tahun 2018-2022?”**.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian beberapa masalah yang telah dijelaskan maka penulis memberi batasan masalah yang diteliti agar pembahasan tidak keluar dari konteks pembahasan. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian pada latar belakang atau faktor–faktor masalah sehingga terjadinya krisis pangan di Lebanon. Serta melihat bagaimana respons aktor *non state* yaitu *World Food Programme* (WFP) dalam memberikan bantuan terhadap krisis pangan di Lebanon.

Kemudian agar penelitian ini semakin fokus, maka peneliti juga memberikan batasan pada rentang waktu yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rentang waktu pada tahun 2018-2022.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan maka, peneliti juga membuat tujuan penelitian agar dapat lebih fokus dalam menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kondisi domestik yang ada di Lebanon
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi WFP sebagai salah satu organisasi pangan terbesar di dunia dalam menangani krisis pangan yang terjadi di Lebanon melalui implementasi program WFP yaitu *Lebanon Country Strategic Plan 2018-2022*.
3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh WFP dalam menangani krisis pangan di Lebanon.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka terdapat kegunaan dari dilakukannya penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana jurusan Hubungan Internasional. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasi konsep maupun teori dalam ilmu Hubungan Internasional dalam melihat fenomena atau isu-isu yang sedang berkembang di dalam Hubungan Internasional.

2. Untuk menambah pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian serta merumuskan hasil dari sebuah penelitian dari masalah yang diangkat. Serta memberikan pandangan baru terhadap suatu permasalahan serta menganalisis dan mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang.

Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangsih pengetahuan serta wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai faktor-faktor terjadinya krisis pangan di Lebanon serta kontribusi WFP sebagai organisasi pangan dunia dalam menangani krisis pangan tersebut pada tahun 2018-2022.
2. Tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk para pembaca tentang krisis pangan di Lebanon serta kontribusi yang diberikan oleh WFP.